



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Lantai 7, Jakarta 13120  
Telp: (021) 85910031 (Hunting), Fax: (021) 85910030

Nomor : S- 345 /SU04/1/2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Kepala BPKP  
Nomor 265/K/D2/2021

29 April 2021

Yth.  
Direktur Pengawasan Bidang Sosial  
dan Penanganan Bencana  
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Kepala BPKP Nomor 265/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,  
  
E. Samiana  
NIP. 19671124 199203 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP-265/K/D2/2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BAGI APARAT PENGAWASAN  
INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pelaksanaan distribusi vaksin dan adanya pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, perlu disesuaikan ketentuan pengawasan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan menjadi acuan bagi APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- KETIGA** : Pelaksanaan pedoman pengawasan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengawasan yang ditetapkan oleh Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Vaksinasi Tingkat Pusat.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

ERI Satriana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP-265/K/D2/2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) BAGI APARAT  
PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH/KEMENTERIAN/  
LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN  
INTERN PEMERINTAH/KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH/DAERAH

I. Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan

Sasaran Pengawasan adalah program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh:

A. Pusat

1. Kementerian Kesehatan RI.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Penyedia Penerima Penugasan/ Penunjukan Langsung dan/atau Pendistribusian Vaksin COVID-19.

B. Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Dinas Kesehatan Provinsi
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

C. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas
2. Klinik
3. Rumah Sakit
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

D. Pelaksanaan Vaksinasi di Luar Fasyankes seperti Vaksinasi Massal, Vaksinasi di Instansi Pemerintah, *Drive Thru* atau yang sejenisnya.

Ruang lingkup pengawasan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

## II. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan di level pusat dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.

Pengawasan di level daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah, APIP K/L dan Perwakilan BPKP sesuai dengan wilayah kerjanya.

Masing-masing APIP agar mengalokasikan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19.

BPKP menjadi koodinator terhadap kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19 di tingkat pusat dan daerah.

## III. PROSEDUR PENGAWASAN

### A. Level Pusat

#### 1. Survey Pendahuluan

Mengumpulkan dokumen/ informasi :

- a. Struktur organisasi pelaksana vaksinasi COVID-19 tingkat pusat.
- b. Tata Kelola Obat/Vaksin COVID-19 dan distribusi ke provinsi/hub
- c. Sumber anggaran DIPA dan sumber keuangan lainnya tingkat pusat.
- d. Kebijakan target indikator keberhasilan program tingkat pusat.
- e. Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat pusat.

#### 2. Tentative Audit Objective (TAO)

Tentative *Audit Objective* (TAO) di level pusat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Anggaran di level pusat tidak cukup
2)	Sasaran kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai dengan prioritas tahapan
3)	Pendataan dan Penetapan sasaran vaksinasi belum dilakukan
4)	Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan

	ketentuan
5)	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik ( <i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i> ), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, <i>face shield</i> dan apron) dan <i>Cold Chain (Cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)</i> tidak sesuai dengan ketentuan.
6)	Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
b.	Monitoring
1)	Target waktu dan jumlah sasaran nasional setiap prioritas tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai
2)	Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti
3)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
4)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.
5)	Terdapat penyuntikan kedua sasaran yang melebihi rentang waktu yang telah ditetapkan.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) TAO: Anggaran di level pusat tidak cukup.

Tujuan Pengawasan: memastikan anggaran memadai di level pusat.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan Data perencanaan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi dan bandingkan dengan rencana kebutuhan.
- b) Lakukan penelusuran dokumen anggaran untuk meyakini kecukupan anggaran.
- c) Lakukan wawancara untuk mengetahui kekurangan anggaran yang terjadi dan apa yang telah dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran.

- d) Lakukan pendalaman untuk mengetahui prioritas-prioritas yang dilakukan dan apa yang dilakukan untuk yang tidak masuk dalam prioritas.
- e) Lakukan analisa secara komprehensif untuk kemudian Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Sasaran kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai dengan prioritas tahapan.

Tujuan Pengawasan: memastikan sasaran prioritas mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dan pelajari dokumen resmi berupa:
  - (1) Data Kelompok sasaran vaksinasi COVID-19 yang berasal dari mekanisme *top down* dan *bottom-up* yang sudah *dicleansing* dan masuk kedalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 atau sumber lain (Laporan Manual)
  - (2) Data Kelompok sasaran yang tidak masuk dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 atau yang telah diinput melalui Aplikasi PCare Vaksinasi, atau aplikasi lainnya.
  - (3) Dokumen penetapan tahapan prioritas penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin
- b) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian antara data kelompok sasaran pada mekanisme *top down* dan *bottom up*, data Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19, dan data yang berasal dari Aplikasi PCare Vaksinasi, atau aplikasi lainnya.
- c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan Tahapan Prioritas sasaran.
- d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat jika objek vaksinasi tidak sesuai dengan kelompok sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.



- 3) TAO: Pendataan dan Penetapan sasaran vaksinasi belum dilakukan

Tujuan Pengawasan: Memastikan Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan dan penetapan sasaran vaksinasi covid-19

- a) Dapatkan dan pelajari peraturan mengenai kewajiban Menteri Kesehatan untuk menetapkan jumlah sasaran vaksinasi
  - b) Dapatkan dan pelajari ketentuan mengenai pendataan sasaran vaksinasi
  - c) Dapatkan dokumen formal penetapan sasaran penerima vaksin yg ditetapkan Kemenkes.
  - d) Bandingkan dengan kondisi riil di lapangan
  - e) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat jika sasaran vaksinasi belum/tidak ditetapkan
  - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja
- 4) TAO: Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi sesuai dengan ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas).

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dan pelajari SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi dari pusat ke provinsi, termasuk salah satunya adalah ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
- b) Dapatkan rencana (jumlah, jadwal, dan mekanisme) distribusi vaksin dari pusat ke provinsi/hub.
- c) Dapatkan dokumen BAST dari PT. Biofarma.Tbk ke provinsi/hub.
- d) Dapatkan data sasaran atau pendukung lainnya sesuai dengan tahapan prioritas vaksinasi per provinsi.
- e) Bandingkan rencana distribusi dengan BAST, cek mengenai ketepatan waktu dan jumlah pendistribusiannya.
- f) Lakukan pengecekan arus mutasi vaksin pada aplikasi logistic vaksin seperti SMDV, Biotracking, dan/atau SMILE.
- g) Lakukan stock opname vaksin pada gudang PT. Biofarma.Tbk/ penyedia vaksin.

- h) Bandingkan pelaksanaan distribusi vaksin dengan ketentuan CDOB atau ketentuan lain dalam rangka menjaga mutu/kualitas vaksin saat pendistribusian.
- i) Lakukan wawancara atau analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya.
- j) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

5) TAO: Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: Memastikan Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa :

(1) Jumlah dan Jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* yang diperlukan terkait Vaksinasi COVID-19 ke tiap provinsi.

(2) Daftar distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* yang diperlukan terkait vaksinasi COVID-19.

(3) Jumlah vaksin yang didistribusikan per provinsi

b) Teliti dan periksa apakah perhitungan jumlah dan jenis peralatan pendukung serta logistic yang diperlukan terkait Vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan daftar distribusi yang ditetapkan.

- c) Pastikan distribusi peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* vaksin COVID-19 ke tiap diterima dalam kondisi baik, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- d) Pastikan jumlah alat pendukung sesuai dengan jumlah vaksin yang didistribusikan
- e) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

6) Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya memenuhi kebutuhan vaksinasi

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah target sasaran dan waktu pelaksanaan vaksinasi per tahapan
- b) Dapatkan data realisasi pelaksanaan vaksinasi per tahapan
- c) Dapatkan data atau informasi rasio kemampuan vaksinator dalam melakukan vaksinasi per hari
- d) Dapatkan jumlah kebutuhan vaksinator yang harus tersedia untuk memenuhi target waktu vaksinasi per tahapan
- e) Dapatkan data atau informasi mengenai jumlah total vaksinator covid-19 yang tersedia
- f) Bandingkan data jumlah kebutuhan vaksinator dengan jumlah vaksinator yang tersedia
- g) Dapatkan informasi mengenai usulan penambahan vaksinator dari daerah jika ada
- h) Lakukan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait mengenai alternatif penyelesaian permasalahan
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

b. Monitoring

1) TAO: Target waktu dan jumlah sasaran nasional setiap prioritas tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai

Tujuan Pengawasan: memastikan Target waktu dan jumlah sasaran nasional setiap prioritas tahapan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa:

(1) Target output setiap tahapan yang akan dicapai terkait vaksinasi COVID-19.

(2) Capaian / realisasi output setiap tahapan yang telah dicapai terkait vaksinasi COVID-19.

(3) Jadwal pelaksanaan vaksinasi per tahapan

b) Teliti dan analisa antara target dan realisasi apakah terdapat gap / perbedaan diantara keduanya.

c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.

d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.

e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti

Tujuan Pengawasan: memastikan Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 didokumentasikan dan hasilnya telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari Pusat ke Provinsi/Kab/Kota/Fasyankes secara manual atau melalui aplikasi.

b) Teliti dan analisa antara dokumen apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.

c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.

- d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tersebut.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
- b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi
- c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- d) Dapatkan data Rekapitulasi Harian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Provinsi, bandingkan dengan data yang ada dalam aplikasi PCare.
- e) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- f) Identifikasi permasalahan yang ada.
- g) Temukan penyebab permasalahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Permasalahan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak segera ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan laporan KIPI yang masuk ke pusat yang disampaikan secara manual dan aplikasi dari Provinsi.
- b) Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI yang tercantum dalam laporan.

- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 5) TAO: Terdapat penyuntikan kedua sasaran yang melebihi rentang waktu yang telah ditetapkan
- Tujuan Pengawasan: Memastikan penyuntikan kedua pada sasaran tidak melebihi rentang waktu yang telah ditetapkan untuk menjaga keefektifan vaksinasi.
- a) Dapatkan ketentuan terkait rentang waktu antara suntikan pertama dan kedua yang diperbolehkan per jenis vaksin
  - b) Dapatkan data dari Kementerian Kesehatan terkait Sasaran yang melebihi batas waktu penyuntikan kedua
  - c) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

## B. Provinsi

### 1. Survey Pendahuluan

Mengumpulkan dokumen/ informasi :

- a. Struktur organisasi pelaksana vaksinasi COVID-19 tingkat provinsi.
- b. Tata Kelola Obat/Vaksin COVID-19 dan distribusi ke kabupaten/kota/Hub.
- c. Sumber anggaran DIPA dan sumber keuangan lainnya tingkat provinsi.
- d. Kebijakan target indikator keberhasilan program tingkat provinsi.
- e. Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat provinsi.

### 2. Tentative Audit Objective

*Tentative Audit Objective* (TAO) di level provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
2)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima kurang atau berlebih dari yang dibutuhkan.

3)	Distribusi dan penyimpanan vaksin di provinsi/Hub tidak sesuai dengan ketentuan.
4)	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik ( <i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i> ), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, <i>face shield</i> dan apron) dan <i>Cold Chain (Cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)</i> tidak sesuai dengan ketentuan.
b.	Monitoring
1)	Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai.
2)	Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti
3)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti
4)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
5)	Stock vaksin tidak sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik.
6)	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal
c.	Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Logistik
1)	Kualitas <i>cold chain</i> vaksin di daerah provinsi/hub seperti, <i>cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer</i> tidak memadai
2)	Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) TAO: Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Memastikan pemerintah provinsi mempunyai dana dukungan vaksinasi

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasi usulan kebutuhan dana vaksinasi di provinsi.
- b) Identifikasi alokasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi di provinsi dari berbagai sumber.
- c) Lakukan konfirmasi apabila terjadi gap antara usulan dengan alokasi anggaran vaksinasi.
- d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima kurang atau berlebih dari yang dibutuhkan

Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima sesuai kebutuhan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data alokasi/perencanaan kebutuhan vaksin untuk tingkat provinsi dan rinciannya per kabupaten/kota.
- b) Dapatkan dokumen distribusi vaksin untuk tingkat provinsi dan rinciannya kabupaten/kota.
- c) Bandingkan jumlah vaksin yang didistribusikan dengan yang dialokasikan/direncanakan.
- d) Bandingkan dokumen distribusi/BAST dengan data yang diperoleh dari aplikasi elektronik seperti Biotracking atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- e) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- f) Lakukan analisa dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan terjadi.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Distribusi dan penyimpanan vaksin di provinsi/Hub tidak sesuai dengan ketentuan

Tujuan Pengawasan: memastikan Distribusi dan penyimpanan vaksin di provinsi/Hub telah sesuai dengan ketentuan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait distribusi dan penyimpanan vaksin.



- b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari provinsi/Hub ke kabupaten/kota.
- c) Bandingkan antara aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB dengan pelaksanaan distribusi dan penyimpanan di level Provinsi.
- d) Dapatkan dokumen DO/SBBK dari PT. Bio Farma (Persero) ke provinsi/Hub
- e) Lakukan penelusuran terhadap distribusi vaksin dari Pusat ke Provinsi/Hub yang telah dilakukan.
- f) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.
- g) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar
- h) Dapatkan data vaksin untuk FEFO (First Expired First Out)
- i) Dapatkan data vaksin untuk FIFO (First In First Out)
- j) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, spesifikasi vaksin, fisik vaksin, dan *expired date*.
- k) Identifikasi apabila ada vaksin yang rusak/tidak layak secara kualitas karena proses distribusi dan penyimpanan yang kurang baik di level Provinsi.
- l) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
- m) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *Cold Chain (Cold room, refrigerator, dan freezer)* tidak sesuai dengan kebutuhan

Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *Cold Chain (Cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* telah sesuai dengan kebutuhan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen/data rencana kebutuhan peralatan pendukung/logistik (*ADS, Alcohol Swab, Safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *Cold Chain (Cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk tingkat provinsi dan dasar perhitungannya
- b) Bandingkan data dokumen distribusi dengan dokumen/data rencana kebutuhan peralatan pendukung/logistik, alat pelindung diri, dan *Cold Chain*.
- c) Bandingkan dokumen distribusi dengan data yang diperoleh dari aplikasi elektronik, seperti dari Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- d) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- e) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

**b. Monitoring**

- 1) TAO: Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tercapai

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen/data antara lain:

- (1) Jadwal vaksinasi COVID-19 di setiap tahapan.

- (2) Dokumen kelompok sasaran prioritas tahapan terkait vaksinasi COVID-19

- (3) Target jumlah Sasaran vaksinasi di provinsi

- b) Bandingkan antara kriteria dengan kondisi pelaksanaannya, apakah vaksinasi tepat waktu sesuai jadwal atau tidak.
- c) Bandingkan data kelompok sasaran prioritas per tahapan dengan data sasaran prioritas yang telah dilakukan vaksinasi sesuai prioritas per tahapan. Cek apakah vaksinasi tepat sasaran prioritas di setiap tahapan atau tidak.
- d) Bandingkan realisasi dengan target jumlah sasaran vaksinasi per tahapan vaksinasi di Provinsi.

- e) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
  - f) Lakukan analisis dan wawancara kepada pihak yang terkait untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
  - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja
- 2) TAO: Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti.
- Tujuan Pengawasan: memastikan seluruh hasil monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari provinsi secara manual maupun melalui aplikasi.
  - b) Teliti dan analisa dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.
  - c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.
  - d) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait atas permasalahan tersebut.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja
- 3) TAO: Permasalahan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak segera ditindaklanjuti.
- Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Provinsi.
  - b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
  - c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI yang tercantum dalam laporan.
  - d) Lakukan analisis dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.

e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
- b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
- c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- d) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
- e) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

5) Stock vaksin tidak sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban stock vaksin sesuai dengan ketentuan.

- a) Dapatkan data penerimaan dan distribusi vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Lakukan *stock opname* di Gudang /Hub/ tempat penyimpanan vaksin di level provinsi
- c) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di provinsi telah melakukan pencatatan stock vaksin dengan tertib baik secara manual ataupun melalui aplikasi, seperti di SMDV (Sistem Monitoring Distribusi Vaksin), Biotracking, dan/atau SMILE
- d) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di provinsi telah melakukan *stock opname* vaksin secara reguler.

- e) Bandingkan catatan/administrasi stock vaksin dengan hasil *stock opname* vaksin di Gudang / Hub/ tempat penyimpanan vaksin di level provinsi
- f) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
- g) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

6) TAO : Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: memastikan seluruh pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi telah dilaksanakan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi manual per tahapan vaksinasi
- b) Dapatkan data pelaporan yang telah diinput pada aplikasi, seperti di Pcare atau satu data vaksinasi per tahapan vaksinasi
- c) Bandingkan laporan kegiatan vaksinasi manual per tahapan dengan data pelaporan yang telah diinput pada aplikasi per tahapan, apakah terdapat perbedaan/delay input apa tidak, apabila terdapat perbedaan lakukan analisis
- d) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- e) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat laporan kegiatan vaksinasi yang belum terinput dalam aplikasi
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

c. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Logistik

1) TAO: Kualitas cold chain vaksin di daerah provinsi/hub seperti, cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer tidak memadai

Tujuan Pengawasan: memastikan kualitas cold chain vaksin di daerah provinsi/hub seperti, cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer telah memadai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan yang mengatur mengenai standar kualitas cold chain, seperti aturan mengenai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
  - b) Bandingkan SOP/peraturan dengan pengelolaan peralatan pendukung (cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer) yang dilakukan oleh petugas di Provinsi/Hub.
  - c) Dapatkan dokumen jumlah peralatan pendukung (cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer) yang belum berfungsi dengan baik di Provinsi/Hub.
  - d) Lakukan inventarisasi untuk meyakini jumlah dan jenis cold chain yang belum berfungsi dengan baik di Provinsi /Hub.
  - e) Lakukan uji fisik untuk meyakini kesesuaian peralatan pendukung (cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer) yang menurut pencatatan berfungsi baik dengan standar Nasional atau CDOB.
  - f) Bandingkan jumlah vaksin dengan kapasitas cold chain yang ada di Provinsi /Hub.
  - g) Lakukan wawancara dengan petugas atau penanggung jawab vaksinasi di kabupaten/kota mengenai kondisi peralatan pendukung (cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer).
  - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 2) Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
- Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya memenuhi kebutuhan vaksinasi
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan jumlah target sasaran dan waktu pelaksanaan vaksinasi per tahapan di Provinsi
  - b) Dapatkan data realisasi pelaksanaan vaksinasi per tahapan di Provinsi
  - c) Dapatkan data atau informasi rasio kemampuan vaksinator dalam melakukan vaksinasi per hari
  - d) Dapatkan jumlah kebutuhan vaksinator yang harus tersedia untuk memenuhi target waktu vaksinasi per tahapan di Provinsi

- e) Dapatkan data atau informasi mengenai jumlah total vaksinator covid-19 yang tersedia di Provinsi
- f) Bandingkan data jumlah kebutuhan vaksinator dengan jumlah vaksinator yang tersedia
- g) Dapatkan informasi mengenai usulan penambahan vaksinator ke Pusat atau dari kabupaten/Kota jika ada
- h) Lakukan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait mengenai alternatif penyelesaian permasalahan
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

C. Kabupaten/Kota

*Tentative Audit Objective (TAO)* di level kabupaten/kota dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
2)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima kurang atau berlebih dari yang dibutuhkan
3)	Distribusi dan penyimpanan vaksin di Kabupaten Kota/Hub tidak sesuai dengan ketentuan.
4)	Distribusi Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik ( <i>Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box</i> ), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, <i>face shield</i> dan apron) dan <i>cold chain (cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer)</i> tidak sesuai dengan ketentuan
5)	Terdapat fasyankes yang seharusnya siap/layak melaksanakan vaksinasi namun belum ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b.	Monitoring
1)	Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai
2)	Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti
3)	Permasalahan KIPi tidak segera ditindaklanjuti
4)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan

	yang berlaku
5)	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal
6)	Stock vaksin tidak sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik
7)	Terdapat sasaran vaksinasi yang menolak dilakukan vaksinasi
c.	Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Logistik
1)	Kualitas <i>cold chain</i> (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, <i>coldroom</i> , <i>freeze room</i> , <i>refrigerator</i> , dan <i>freezer</i> tidak memadai.
2)	Vaksinator, Tenaga Kesehatan lainnya, Pengelola Program, dan Supervisor belum mendapatkan pelatihan/sosialisasi
3)	Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) TAO : Pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: memastikan Pemerintah kabupaten/kota mempunyai dana dukungan vaksinasi.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasi usulan kebutuhan dana vaksinasi di kabupaten/kota.
- b) Identifikasi alokasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota dari berbagai sumber.
- c) Lakukan konfirmasi apabila terjadi gap antara usulan dengan alokasi anggaran vaksinasi.
- d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO : Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima kurang atau berlebih dari yang dibutuhkan



Tujuan Pengawasan: Meyakini Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima sesuai dengan yang dibutuhkan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data alokasi/perencanaan kebutuhan vaksin untuk tingkat kabupaten/kota.
  - b) Dapatkan dokumen distribusi vaksin untuk tingkat kabupaten/kota.
  - c) Bandingkan jumlah vaksin yang didistribusikan dengan yang dialokasikan/direncanakan.
  - d) Bandingkan dokumen distribusi/BAST dengan data yang diperoleh dari aplikasi elektronik seperti Biotracking atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
  - e) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
  - f) Lakukan analisa dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan terjadi.
  - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 3) Distribusi dan penyimpanan vaksin di Kabupaten Kota/Hub tidak sesuai dengan ketentuan

Tujuan Pengawasan : memastikan Distribusi dan penyimpanan vaksin di Kabupaten/Kota/Hub telah sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP, Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19, dan/atau Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) terkait distribusi dan penyimpanan vaksin.
- b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari Kabupaten/Kota/Hub ke Fasyankes.
- c) Bandingkan antara aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB dengan pelaksanaan distribusi dan penyimpanan di level Kabupaten/Kota/Hub.
- d) Dapatkan dokumen DO/SBBK dari Provinsi/Hub ke Kabupaten/Kota/Hub
- e) Lakukan penelusuran terhadap distribusi vaksin dari Provinsi ke Kabupaten/Kota/Hub yang telah dilakukan.

- f) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.
  - g) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar
  - h) Dapatkan data vaksin untuk FEFO (First Expired First Out)
  - i) Dapatkan data vaksin untuk FIFO (First In First Out)
  - j) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, spesifikasi vaksin, fisik vaksin, dan *expired date*.
  - k) Identifikasi apabila ada vaksin yang rusak/tidak layak secara kualitas karena proses distribusi dan penyimpanan yang kurang baik di level Kabupaten/Kota/Hub.
  - l) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
  - m) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) tidak sesuai dengan kebutuhan

Tujuan Pengawasan: Meyakini jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) sesuai dengan kebutuhan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasikan kebutuhan peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) kegiatan vaksinasi COVID-19.
- b) Identifikasikan jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine*

*carrier dan freezer*) yang diterima di tingkat kabupaten/kota/hub.

- c) Peroleh data distribusi peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer)* ke fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19.
  - d) Bandingkan data dokumen distribusi dengan dokumen/data rencana kebutuhan peralatan pendukung/logistik, alat pelindung diri, dan *Cold Chain*.
  - e) Bandingkan dokumen distribusi dengan data yang diperoleh dari aplikasi elektronik, seperti dari Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
  - f) Lakukan uji fisik/stock opname terhadap peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer)*, tuangkan dalam Berita Acara.
  - g) Lakukan uji petik terhadap ketersediaan peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer)* di Fasyankes terpilih.
  - h) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 5) Terdapat fasyankes yang seharusnya siap/layak melaksanakan vaksinasi namun belum ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
- Tujuan Pengawasan: Memastikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah menetapkan seluruh fasyankes yang telah siap/layak melaksanakan vaksinasi untuk membantu percepatan vaksinasi
- a) Dapatkan hasil dokumen hasil pendataan fasyankes pada dinas Kesehatan kabupaten/Kota terkait kemampuan pelaksanaan vaksinasi

- b) Dapatkan SK penetapan fasyankes mampu/layak vaksin covid-19
- c) Dapatkan daftar fasyankes yang tidak melaksanakan kegiatan vaksinasi covid-19
- d) Lakukan uji petik dan analisis kemampuan vaksinasi covid-19 terhadap fasyankes yang tidak melaksanakan vaksinasi
- e) Identifikasi fasyankes yang seharusnya siap melakukan vaksinasi namun belum ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
- f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak terkait
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

b. Monitoring

- 1) TAO: Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: meyakini target sasaran dan waktu Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan yang telah ditetapkan tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen/data antara lain:
  - (1)Jadwal vaksinasi COVID-19 di setiap tahapan.
  - (2)Dokumen kelompok sasaran prioritas tahapan terkait vaksinasi COVID-19
  - (3)Target jumlah Sasaran vaksinasi di Kabupaten/Kota
- b) Bandingkan antara kriteria dengan kondisi pelaksanaannya, apakah vaksinasi tepat waktu sesuai jadwal atau tidak.
- c) Bandingkan data kelompok sasaran prioritas per tahapan dengan data sasaran prioritas yang telah dilakukan vaksinasi sesuai prioritas per tahapan. Cek apakah vaksinasi tepat sasaran prioritas di setiap tahapan atau tidak.
- d) Bandingkan realisasi dengan target jumlah sasaran vaksinasi per tahapan vaksinasi di Kabupaten/Kota.
- e) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- f) Lakukan analisis dan wawancara kepada pihak yang terkait untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.

g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

2) TAO: Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti

Tujuan Pengawasan: memastikan Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 didokumentasikan dan hasilnya telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari Kab/Kota ke Fasyankes secara manual atau melalui aplikasi.
- b) Teliti dan analisa antara dokumen apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.
- d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tersebut.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Permasalahan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak segera ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota.
- b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara berkala dari fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI di Fasyankes terpilih.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 4) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
- b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
- c) Dapatkan Peraturan terkait pelaporan hasil pelayanan vaksinasi ditingkat Kab/Kota dan Fasyankes.
- d) Dapatkan laporan Pencatatan Pelayanan Vaksinasi COVID-19 Rekapitulasi Harian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Tingkat Kab/Kota dan Fasyankes.
- e) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- f) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- g) Identifikasi permasalahan yang ada.
- h) Temukan penyebab permasalahan.
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.

- 5) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di fasyankes melalui aplikasi P-care dan Aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- b) Identifikasi Fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
- c) Dapatkan laporan manual dari Fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.

- d) Telusuri upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota atas fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
  - e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 6) TAO: Stock vaksin tidak sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik

Tujuan Pengawasan: memastikan Stock vaksin telah sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data penerimaan dan distribusi vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
  - b) Lakukan *stock opname* di Gudang / Hub/ tempat penyimpanan vaksin di level Kabupaten/Kota
  - c) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di Kabupaten/Kota telah melakukan pencatatan stock vaksin dengan tertib baik secara manual ataupun melalui aplikasi, seperti di SMDV (Sistem Monitoring Distribusi Vaksin) dan SMILE
  - d) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di Kabupaten/Kota telah melakukan *stock opname* vaksin secara reguler.
  - e) Bandingkan catatan/administrasi stock vaksin dengan hasil *stock opname* vaksin di Gudang / Hub/ tempat penyimpanan vaksin di level Kabupaten/Kota
  - f) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
  - g) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
  - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja
- 7) TAO: Terdapat sasaran vaksinasi yang menolak dilakukan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Mengidentifikasi penyebab sasaran menolak dilakukan vaksinasi yang berakibat pada rendahnya/lambatnya pencapaian output program vaksinasi

- a) Dapatkan data sasaran vaksinasi di Kabupaten/kota
- b) Dapatkan informasi atau data sasaran yang menolak dilakukan vaksinasi
- c) Lakukan konfirmasi atau wawancara terhadap sasaran yang menolak dilakukan vaksinasi secara uji petik untuk mengetahui alasan penolakan vaksinasi covid-19
- d) Wawancara pihak terkait mengenai strategi komunikasi yang telah dilakukan
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Logistik

- 1) TAO: Kualitas *cold chain* (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, *coldroom*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer* tidak memadai

Tujuan Pengawasan: memastikan kualitas *cold chain* (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, *coldroom*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer* telah memadai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan yang mengatur mengenai standar kualitas *cold chain*.
- b) Bandingkan SOP/peraturan dengan pengelolaan peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang dilakukan oleh petugas di kabupaten/kota/Hub.
- c) Dapatkan dokumen jumlah peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang belum berfungsi dengan baik di kabupaten/kota/Hub.
- d) Lakukan inventarisasi untuk meyakini jumlah dan jenis *cold chain* yang belum berfungsi dengan baik di kabupaten/kota/Hub.
- e) Lakukan uji fisik untuk meyakini kesesuaian peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang menurut pencatatan berfungsi baik dengan standar Nasional.
- f) Bandingkan jumlah vaksin dengan kapasitas *cold chain* yang ada di kabupaten/kota/Hub.



- g) Lakukan wawancara dengan petugas atau penanggung jawab vaksinasi di kabupaten/kota mengenai kondisi peralatan pendukung (cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer).
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Vaksinator, Tenaga Kesehatan lainnya, Pengelola Program, dan Supervisor belum mendapatkan pelatihan

Tujuan Pengawasan: Memastikan Vaksinator, Tenaga Kesehatan lainnya, Pengelola Program, dan Supervisor telah mendapatkan pelatihan sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen rencana kegiatan pelatihan yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b) Dapatkan data Jumlah Vaksinator di kabupaten/Kota yang bertugas melayani vaksinasi covid-19
- c) Dapatkan data Jumlah Vaksinator di kabupaten/Kota yang bertugas melayani vaksinasi covid-19 namun belum mendapatkan pelatihan
- d) Dapatkan perjanjian kerja sama pelatihan dengan instansi pelatihan kesehatan.
- e) Dapatkan pedoman penyelenggaraan pelatihan (termasuk kurikulum pelatihan).
- f) Dapatkan dokumen laporan hasil pelaksanaan pelatihan vaksinator.
- g) Bandingkan hasil pelaksanaan dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan dan perjanjian kerja sama pelatihan.
- h) Lakukan wawancara dengan pihak terkait apabila terdapat permasalahan
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.

3) Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya memenuhi kebutuhan vaksinasi

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah target sasaran dan waktu pelaksanaan vaksinasi per tahapan di Kabupaten/Kota
- b) Dapatkan data realisasi pelaksanaan vaksinasi per tahapan di Kabupaten/Kota
- c) Dapatkan data atau informasi rasio kemampuan vaksinator dalam melakukan vaksinasi per hari
- d) Dapatkan jumlah kebutuhan vaksinator yang harus tersedia untuk memenuhi target waktu vaksinasi per tahapan di Kabupaten/Kota
- e) Dapatkan data atau informasi mengenai jumlah total vaksinator covid-19 yang tersedia di Kabupaten/Kota
- f) Bandingkan data jumlah kebutuhan vaksinator dengan jumlah vaksinator yang tersedia di Kabupaten/Kota
- g) Dapatkan informasi mengenai usulan penambahan vaksinator ke Pusat/Provinsi atau dari Fasyankes jika ada
- h) Lakukan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait mengenai alternatif penyelesaian permasalahan
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

D. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

*Tentative Audit Objective* (TAO) di level Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Pelaksanaan
1)	Ahur Pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan tidak sesuai ketentuan
2)	Terdepat penyuntikan kedua melebihi rentang waktu yang telah ditetapkan.
3)	KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti
4)	Terdepat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan
5)	Jumlah vaksin yang diterima kurang atau berlebih dari kebutuhan
6)	Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin secara manual maupun elektronik secara tertib
7)	Pemakaian vaksin melebihi <i>wastage rate</i> yang telah

	ditetapkan.
8)	Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh petugas atau vaksinastor tidak sesuai ketentuan.
9)	Ditemukan kualitas vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan
10)	Pembuangan sampah medis tidak sesuai manajemen limbah
11)	Terdapat sasaran vaksinasi yang menolak dilakukan vaksinasi
12)	Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi
b.	Monitoring
1)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE
2)	Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal
3)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
c.	Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
1)	Cold chain atau tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard
2)	Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

- 1) TAO: Alur Pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan tidak sesuai ketentuan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini alur pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan telah sesuai ketentuan.

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

- b) Pelajari ketentuan alur pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes (Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19).
- c) Lakukan observasi terhadap penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- d) Bandingkan hasil observasi dengan ketentuan protokol kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Terdapat penyuntikan kedua melebihi rentang waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan ketentuan terkait rentang waktu antara suntikan pertama dan kedua yang diperbolehkan per jenis vaksin.
- b) Dapatkan ketentuan mengenai *Drop Out* vaksinasi COVID-19
- c) Dapatkan jumlah sasaran yang penyuntikan keduanya melebihi rentang waktu yang telah ditetapkan pada Fasyankes.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) pada vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan register penerima vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- b) Identifikasi penerima vaksinasi yang mengalami KIPI.
- c) Telusuri tindak lanjut atas kejadian KIPI.
- d) Lakukan Uji petik ke pihak terkait (penerima vaksinasi dan pemberi layanan tindak lanjut KIPI)

- e) Identifikasi KIPi yang tidak ditindaklanjuti dan telusuri penyebabnya.
  - f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan.
- Tujuan Pengawasan: memastikan sasaran prioritas mendapatkan vaksinasi sesuai tahapan.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan dokumen penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin sesuai tahapan.
  - b) Dapatkan data sasaran penerima vaksinasi (sesuai tahapan) di tingkat fasyankes dari aplikasi P-care atau sumber lain
  - c) Cek, apakah sasaran penerima vaksinasi telah sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.
  - d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 5) TAO: Jumlah vaksin yang diterima kurang atau berlebih dari kebutuhan
- Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima sesuai kebutuhan.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan data alokasi/perencanaan kebutuhan vaksin untuk tingkat Fasyankes.
  - b) Dapatkan dokumen distribusi vaksin untuk tingkat Fasyankes.
  - c) Bandingkan jumlah vaksin yang didistribusikan dengan yang dialokasikan/direncanakan.
  - d) Bandingkan dokumen distribusi/BAST dengan data yang diperoleh dari aplikasi elektronik seperti Biotracking atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
  - e) Catat hal-hal yang tidak sesuai.

- f) Lakukan analisa dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan terjadi.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

6) TAO: Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin secara manual maupun elektronik secara tertib

Tujuan Pengawasan: memastikan pencatatan atas penggunaan vaksin secara manual maupun elektronik dilakukan secara tertib

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data penerimaan dan distribusi vaksin ke Fasyankes
- b) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di Fasyankes telah melakukan pencatatan stock vaksin dengan tertib baik secara manual ataupun melalui aplikasi, seperti di SMDV (Sistem Monitoring Distribusi Vaksin) dan SMILE
- c) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di Fasyankes telah melakukan *stock opname* vaksin secara reguler.
- d) Bandingkan catatan/administrasi stock vaksin dengan hasil *stock opname* vaksin di Gudang tempat penyimpanan vaksin di Fasyankes
- e) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
- f) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

7) TAO: Pemakaian vaksin melebihi *wastage rate* yang telah ditetapkan

Tujuan Pengawasan: memastikan vaksin digunakan secara efisien

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dan pelajari ketentuan mengenai *wastage rate* yang diperbolehkan (contoh: untuk vaksinasi tahap 1 dan 2, *wastage rate* yang diperbolehkan adalah 15% per jenis vaksin, artinya jika target sasaran untuk 100 vial, maka vaksin yang dikirimkan adalah sejumlah 115 vial, termasuk 15 vial sebagai cadangan)
- b) Dapatkan data penerimaan dan distribusi vaksin ke Fasyankes

- c) Dapatkan catatan stok opname vaksin oleh petugas yang bertanggung jawab di level fasyankes
  - d) Bandingkan jumlah vaksin yang diterima, jumlah vaksin yang digunakan, dengan jumlah sasaran yang divaksin. Penggunaan vaksin seharusnya tidak melebihi jumlah vaksin yang diterima yang sudah diperhitungkan dengan *wastage rate*-nya.
  - e) Dapatkan informasi jika terjadi kekurangan vaksin dibanding dengan jumlah sasaran di fasyankes, lakukan penelusuran penyebabnya.
  - f) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
  - g) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
  - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja
- 8) TAO: Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh petugas atau vaksinator tidak sesuai ketentuan
- Tujuan Pengawasan: memastikan Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh vaksinator telah sesuai SOP atau ketentuan yang berlaku
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin.
  - b) Lakukan pengamatan terkait Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh petugas atau vaksinator
  - c) Bandingkan antara aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB dengan pelaksanaannya di lapangan
  - d) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar
  - e) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, spesifikasi vaksin, fisik vaksin, dan *expired date*.
  - f) Pastikan vaksin telah digunakan secara FEFO (First Expired First Out)
  - g) Pastikan stok vaksin telah digunakan secara FIFO (First in First Out)

- h) Lakukan analisis dan wawancara jika terdapat permasalahan di fasyankes.
  - i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 9) TAO: Ditemukan kualitas vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Tujuan pengawasan: memastikan kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan, seperti tidak bocor, rusak, berlabel, tidak kadaluarsa, dan warna tidak berubah.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait kriteria vaksin yang baik.
  - b) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, spesifikasi vaksin, fisik vaksin, dan *expired date*.
  - c) Identifikasi apabila ada vaksin yang rusak/tidak layak secara kualitas.
  - d) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 10) TAO: Pembuangan sampah medis tidak sesuai manajemen limbah
- Tujuan pengawasan: memastikan Pembuangan sampah medis telah sesuai manajemen limbah.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait manajemen limbah.
  - b) Lakukan pengamatan terkait manajemen pembuangan sampah medis di fasyankes.
  - c) Identifikasi apabila ada prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan
  - d) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.



- 11) TAO: Terdapat sasaran vaksinasi yang menolak dilakukan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Mengidentifikasi penyebab sasaran menolak dilakukan vaksinasi yang berakibat pada rendahnya/lambatnya pencapaian output program vaksinasi

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan data sasaran vaksinasi di Fasyankes
- b) Dapatkan informasi atau data sasaran yang menolak dilakukan vaksinasi di lingkungan sekitar fasyankes
- c) Lakukan konfirmasi atau wawancara terhadap pihak terkait atau sasaran yang menolak dilakukan vaksinasi secara uji petik untuk mengetahui alasan penolakan vaksinasi covid-19
- d) Wawancara pihak terkait mengenai strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh fasyankes dan dinas kesehatan
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 12) TAO: Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: memastikan tidak Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan ketentuan mengenai penetapan tarif vaksinasi resmi jika ada
- b) Lakukan pengamatan terkait proses pelaksanaan vaksinasi
- c) Lakukan wawancara kepada sasaran vaksinasi terkait potensi adanya pungutan liar di luar tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah
- d) Lakukan konfirmasi atau wawancara terhadap pihak terkait jika terjadi pungutan liar di dalam pelaksanaan vaksinasi untuk mengetahui penyebab permasalahan
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

#### b. Monitoring

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan SMILE.

Tujuan Pengawasan: meyakini fasilitas pelayanan kesehatan telah terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan SMILE.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Pastikan Fasyankes telah mendapatkan akses aplikasi P-Care dan SMILE
  - b) Pelajari data aplikasi P-Care dan SMILE pada Fasyankes, berikut tata cara penggunaannya.
  - c) Lakukan pengamatan dan wawancara dengan petugas pengguna aplikasi P-Care dan SMILE terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
  - d) Catat dan telusuri penyebab jika SMILE dan P-Care tidak dapat digunakan oleh fasyankes
  - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 2) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di fasyankes, baik manual dan secara elektronik seperti pada aplikasi P-care dan Aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- b) Dapatkan dan pelajari aturan/juknis mengenai pencatatan manual dan elektronik pelaksanaan vaksinasi
- c) Lakukan pengamatan apakah penginputan layanan vaksinasi telah diinput ke dalam aplikasi sesuai dengan ketentuan
- d) Lakukan perbandingan jumlah laporan manual dengan jumlah yang telah terinput pada aplikasi
- e) Lakukan penelusuran penyebab jika pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak berjalan sesuai ketentuan
- f) Telusuri upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota atas Fasyankes yang tidak menginput laporan manual kedalam aplikasi P-care dan Aplikasi SMILE.
- g) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 3) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen pendukung dan peraturan terkait.
- b) Dapatkan alokasi anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- c) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- d) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- e) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- f) Identifikasi permasalahan yang ada.
- g) Temukan penyebab permasalahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana

- 1) TAO: Cold Chain dan tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard

Tujuan Pengawasan: memastikan Cold Chain dan tempat penyimpanan vaksin sesuai standard.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait penyimpanan vaksin
- b) Dapatkan dokumen vaksin yang diterima di Fasyankes.
- c) Dapatkan dan pelajari ketentuan kriteria cold chain (rantai dingin) pada Fasyankes untuk vaksinasi COVID-19.
- d) Identifikasi jumlah peralatan cold chain (rantai dingin) yang ada di fasyankes. Berikut kondisi/kelayakan cold chain tersebut.
- e) Bandingkan peralatan cold chain (rantai dingin) yang ada di Fasyankes dengan ketentuan kriteria yang berlaku. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- f) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan

vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.

- g) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar.
  - h) Lakukan uji fisik/stock opname terhadap jumlah dan kondisi vaksin COVID-19, tuangkan dalam Berita Acara.
  - i) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
  - j) Lakukan pendalaman mengetahui sebab dan akibat permasalahan yang terjadi.
  - k) Lakukan analisa secara komprehensif.
  - l) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 2) Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya telah memenuhi kebutuhan vaksinasi

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah target sasaran dan waktu pelaksanaan vaksinasi per tahapan di fasyankes
- b) Dapatkan data realisasi pelaksanaan vaksinasi per tahapan di Fasyankes
- c) Dapatkan data atau informasi rasio kemampuan vaksinator dalam melakukan vaksinasi per hari
- d) Dapatkan jumlah kebutuhan vaksinator yang harus tersedia untuk memenuhi target waktu vaksinasi per tahapan di Fasyankes
- e) Dapatkan data atau informasi mengenai jumlah total vaksinator covid-19 yang tersedia di Fasyankes
- f) Bandingkan data jumlah kebutuhan vaksinator dengan jumlah vaksinator yang tersedia di Fasyankes
- g) Dapatkan informasi mengenai usulan penambahan vaksinator ke kabupaten/Kota jika ada
- h) Lakukan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait mengenai alternatif penyelesaian permasalahan
- i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

E. Vaksinasi di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

*Tentative Audit Objective* (TAO) atas kegiatan vaksinasi di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Pelaksanaan
1)	Alur Pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan tidak sesuai ketentuan
2)	KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti
3)	Tidak mencapai jumlah target sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan
4)	Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin
5)	Pemakaian vaksin melebihi <i>wastage rate</i> yang telah ditetapkan
6)	Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.
7)	Ditemukan kualitas vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan
8)	Pembuangan sampah medis tidak sesuai manajemen limbah
9)	Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi
b.	Monitoring
1)	Tempat Pelayanan Vaksinasi belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE
2)	Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal
3)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
c.	Sarana dan Prasarana
1)	Cold chain atau tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard

a. Pelaksanaan

- 1) TAO: Alur Pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan tidak sesuai ketentuan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini alur pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan telah sesuai ketentuan.

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- b) Pelajari ketentuan alur pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19).
- c) Lakukan observasi terhadap penyelenggaraan vaksinasi COVID-19.
- d) Bandingkan hasil observasi dengan ketentuan protokol kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) pada vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan register penerima vaksinasi COVID-19 di tempat pelaksanaan vaksinasi.
- b) Identifikasi penerima vaksinasi yang mengalami KIPI.
- c) Telusuri tindak lanjut atas kejadian KIPI.
- d) Lakukan Uji petik ke pihak terkait (penerima vaksinasi dan pemberi layanan tindak lanjut KIPI)
- e) Identifikasi KIPI yang tidak ditindaklanjuti dan telusuri penyebabnya.
- f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Tidak mencapai jumlah target sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini jumlah target sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan telah tercapai

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan data target sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan vaksinasi
- b) Bandingkan dengan target dengan realisasi capaian sasaran di lapangan
- c) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait terkait ketercapaian target vaksinasi.
- d) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

4) TAO: Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin

Tujuan Pengawasan: memastikan pencatatan atas penggunaan vaksin secara manual maupun elektronik dilakukan secara tertib

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data penerimaan dan distribusi vaksin ke tempat vaksinasi
- b) Lakukan observasi terkait pencatatan mutasi vaksin (diterima, digunakan, dan dikembalikan) oleh petugas
- c) Pastikan PIC atau petugas penyimpanan vaksin di Fasyankes telah melakukan pencatatan atas penggunaan dan sisa stock vaksin dengan tertib
- d) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
- e) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

5) TAO: Pemakaian vaksin melebihi *wastage rate* yang telah ditetapkan

Tujuan Pengawasan: memastikan vaksin digunakan secara efisien

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dan pelajari ketentuan mengenai *wastage rate* yang diperbolehkan (contoh: untuk vaksinasi tahap 1 dan 2, *wastage rate* yang diperbolehkan adalah 15% per jenis vaksin, artinya jika target sasaran untuk 100 vial, maka vaksin yang dikirimkan adalah sejumlah 115 vial, termasuk 15 vial sebagai cadangan)
- b) Dapatkan data penerimaan dan distribusi vaksin ke tempat vaksinasi

- c) Dapatkan catatan stok opname vaksin oleh petugas yang bertanggung jawab di tempat vaksinasi
- d) Bandingkan jumlah vaksin yang diterima, jumlah vaksin yang digunakan, dengan jumlah sasaran yang divaksin. Penggunaan vaksin seharusnya tidak melebihi jumlah vaksin yang diterima yang sudah diperhitungkan dengan *wastage rate*-nya.
- e) Dapatkan informasi jika terjadi kekurangan vaksin dibanding dengan jumlah sasaran, lakukan penelusuran penyebabnya.
- f) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
- g) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

6) TAO: Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan

Tujuan Pengawasan: memastikan Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi telah sesuai SOP atau ketentuan yang berlaku

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin.
  - b) Lakukan pengamatan terkait Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi
  - c) Bandingkan antara aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB dengan pelaksanaannya di lapangan
  - d) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar
  - e) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, spesifikasi vaksin, fisik vaksin, dan *expired date*.
  - f) Lakukan analisis dan wawancara jika terdapat permasalahan.
  - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 7) TAO: Ditemukan kualitas vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan



Tujuan pengawasan: memastikan kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan, seperti tidak bocor, rusak, berlabel, tidak kadaluarsa, dan warna tidak berubah.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait kriteria vaksin yang baik.
- b) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, spesifikasi vaksin, fisik vaksin, dan *expired date*.
- c) Identifikasi apabila ada vaksin yang rusak/tidak layak secara kualitas.
- d) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

8) TAO: Pembuangan sampah medis tidak sesuai manajemen limbah

Tujuan pengawasan: memastikan Pembuangan sampah medis telah sesuai manajemen limbah.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait manajemen limbah.
- b) Lakukan pengamatan terkait manajemen pembuangan sampah medis di tempat vaksinasi.
- c) Identifikasi apabila ada prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan
- d) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

9) TAO: Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: memastikan tidak Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan ketentuan mengenai penetapan tarif vaksinasi resmi jika ada
- b) Lakukan pengamatan terkait proses pelaksanaan vaksinasi

- c) Lakukan wawancara kepada sasaran vaksinasi terkait potensi adanya pungutan liar di luar tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah
- d) Lakukan konfirmasi atau wawancara terhadap pihak terkait jika terjadi pungutan liar di dalam pelaksanaan vaksinasi untuk mengetahui penyebab permasalahan
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

**b. Monitoring**

- 1) Tempat Pelayanan Vaksinasi belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan SMILE.

Tujuan Pengawasan: meyakini Tempat Pelayanan Vaksinasi telah terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan SMILE.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Pastikan Tempat Pelayanan Vaksinasi telah mendapatkan akses aplikasi P-Care dan SMILE
- b) Pelajari data aplikasi P-Care dan SMILE pada Tempat Pelayanan Vaksinasi, berikut tata cara penggunaannya.
- c) Lakukan pengamatan dan wawancara dengan petugas pengguna aplikasi P-Care dan SMILE terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- d) Catat dan telusuri penyebab jika SMILE dan P-Care tidak dapat digunakan oleh Tempat Pelayanan Vaksinasi
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di Tempat Pelayanan Vaksinasi, baik manual dan secara elektronik seperti pada aplikasi P-care dan Aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- b) Dapatkan dan pelajari aturan/juknis mengenai pencatatan manual dan elektronik pelaksanaan vaksinasi

- c) Lakukan pengamatan apakah penginputan layanan vaksinasi telah diinput ke dalam aplikasi sesuai dengan ketentuan
  - d) Lakukan penelusuran penyebab jika pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak berjalan sesuai ketentuan
  - e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
  - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 3) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen pendukung dan peraturan terkait.
- b) Dapatkan alokasi anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19
- c) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19
- d) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- e) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- f) Identifikasi permasalahan yang ada.
- g) Temukan penyebab permasalahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

#### c. Sarana dan Prasarana

- 1) TAO: Cold Chain dan tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard

Tujuan Pengawasan: memastikan Cold Chain dan tempat penyimpanan vaksin sesuai standard.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan aturan, seperti SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19/CDOB terkait penyimpanan vaksin
- b) Dapatkan dokumen vaksin yang diterima tempat pelayanan vaksinasi.
- c) Dapatkan dan pelajari ketentuan kriteria cold chain (rantai dingin) untuk vaksinasi COVID-19.

- d) Identifikasi jumlah peralatan cold chain (rantai dingin) yang ada dan kondisi/kelayakan cold chain tersebut.
- e) Bandingkan peralatan cold chain (rantai dingin) yang ada di tempat pelayanan vaksinasi dengan ketentuan kriteria yang berlaku. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- f) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.
- g) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar.
- h) Lakukan uji fisik/stock opname terhadap jumlah dan kondisi vaksin COVID-19, tuangkan dalam Berita Acara.
- i) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- j) Lakukan pendalaman mengetahui sebab dan akibat permasalahan yang terjadi.
- k) Lakukan analisa secara komprehensif.
- l) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

  
ERI SATRIANA